

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur

- A P. Parlindungan, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1999.
- A.A. Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa Dan Siapa Notaris Di Indonesia*, Cetakan Pertama, CV Media Nusantara, Jakarta, 2015.
- Abdul Ghofur, *Lembaga Kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.
- Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 2010.
- Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Achmad Rubaie, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007.
- Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pemalsuan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- AK. Moch. Anwar, *Beberapa Ketentuan Umum Dalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2001.
- Ali Ahmad Chomzah, *Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia Jilid 2*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2004.
- Bachtiar Effendie, *Kumpulan Tulisan tentang Hukum Tanah*, Cetakan ke 3, Alumni, Bandung, 1993.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Bewa Ragaino, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat Indonesia*, Universitas Padjajaran, Pers, Bandung, 2008.
- Boedi Harsono, *Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanannya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia*, Djambatan, Jakarta, 2000.

- Choerudin, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Cet-1. Jakarta, 1991.
- Christine S.T. Kansil, *Hukum dan Tata Negara Republik Indonesia*, Cetakan Ketiga, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.
- Freddy Haris dan Leny Helena, *Notaris Indonesia*, Lintas Cetak Publishig, Jakarta, 2017.
- H. Salim, HS., *Teknik Pembuatan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.
- H.A.K. Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II) Jilid 1*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Cetakan Kelima, PT. Refika Aditama, Bandung, Habib 2018.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan tentang Notaris dan PPAT)*, Citra Aditya, Bandung, 2009.
- Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Mandar Maju, Bandung, 2005.
- Hikmahanto Juwana, *Aspek Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang, Prosiding Tindak Pidana Pencucian Uang*, Pusat Kajian Hukum, Jakarta, 2005.
- Isdian Anggraeny, dan Isdiyana Kusuma Ayu, *Kepastian Hukum Atas Hak Pengelolaan Tanah Solusi Hukum Dari Insinkronisasi Pengaturan Bidang Pertanahan Di Kota Batam*, Amarta Media, Banyumas, 2020.
- Ismu Gunadi dan Joenaedi Efendi. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- L.J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ditermahkan oleh Oetarid Sadino, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004.
- Lanny Kusumawati, *Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, 2006.
- Marthalena Pohan, *Tanggung Gugat Advokat, Dokter, dan Notaris*, Bina Ilmu, Surabaya, 1985.
- Meriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Edisi Revisi, Gramedia, Jakarta, 2008.
- Muhammad Yaumi, *Pendidikan Karakter (Landasan, Pilar, dan Implementasi)*, Prenada Media, Jakarta, 2014.
- Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, Dan Hukum Perjanjian Yang Harus dikuasai)*, Cakrawala Media, Yogyakarta, 2011.

- Mustofa, *Tuntutan Pembuatan Akta-Akta PPAT, Cetakan Ketiga*, Penerbit Karya Media, Yogyakarta, 2014.
- Neni Sri Imaniyati dan Panji Adam Agus Putra, *Hukum Bisnis Dilengkapi Dengan Kajian Hukum Bisnis Syariah*. PT. Refika Aditama, Bandung, 2017.
- Ngadino, *Ketentuan Umum Tata Cara Pembuatan dan Pengisian Akta PPAT*, CV.Wahyu Prestasi, Semarang, 2019.
- Oemar Moechtar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, Cetakan Pertama, Airlangga University Press, Surabaya, 2017.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Binacipta, Bandung, 1997.
- R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia; Suatu Penjelasan*, Rajawali Pers, Jakarta, 1982.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- R. Subekti, *Perbandingan Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978.
- Ridwan Khairandy, *Perjanjian Jual Beli*, FH UII Press, Yogyakarta, 2016.
- Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum Indonesia*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2003.
- Simun Ismaya, *Pengantar Hukum Agraria*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011.
- Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Raja Grafindo Tinggi, Jakarta, 2010.
- Soekidjo Notoatmojo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.
- Soemitro Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Sudargo Gautama, *Tafsiran Undang-undang Pokok Agraria*, Alumni Bandung, 1991.
- Sudaryo Soimin, *Status Hak dan Pembebasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2013.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.

Supriadi, *Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

Syamsul Kurniawan, *Pendidikan Karakter (Konsepsi & Implementasi secara Terpadu di Lingkungan Keluarga, Sekolah, Perguruan Tinggi, dan Masyarakat)*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2016.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007.

Thomas Lickona, *Mendidik Untuk Membentuk Karakter, Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Bertanggung Jawab*, Terjemahan Oleh: Uyu Wahyudin dan Suryani, Bumi Aksara, Jakarta, 2012.

Titik Triwulan dan Shinta Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Antar Golongan di Indonesia*, Sumur, Bandung, 1976.

Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis, *Hukum Pendaftaran Tanah*, Mandar Maju, Bandung, 2008.

Yulis Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.

B. Perundang-undangan dan Peraturan Pemerintah:

Undang-Undang Dasar Tahun 1945;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Pihak Pelapor Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 112/KEP-4.1/IV/2017 tentang Kode Etik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah;

C. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 248/Pid.B/2022/PN.Jkt.Br.

D. Kamus

Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005.

Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Perusahaan Negara, Balai Pustaka, Jakarta, 2008.

Suharso dan Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*, Widya Karya, Semarang, 2014.

Van Pramodya Puspa, *Kamus Hukum*, Aneka Ilmu, Semarang, 1977.

E. Jurnal:

Andika Syahputra, “Akibat Hukum Terhadap Perjanjian Jual Beli Tanah Yang Tidak Memenuhi Syarat Sah Perjanjian Berdasarkan Kuherperdata Dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria”, *Jurnal Penelitian Derap Hukum*, Vol. 1 No. 1 edisi Januari 2023 – Juni 2023, hlm. 1-12

Ardiansyah Zulhadji, “Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Tanah Menurut Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. V/No. 4/Apr-Jun/2016, hlm. 31-35.

Baharudin, “Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Proses Jual Beli Tanah”, *Jurnal Keadilan Progresif*, Volume 5, Nomor 1, Maret 2014, hlm. 88-101.

Dewa Gde Rudy, “Keabsahan Alat Bukti Surat Dalam Hukum Acara Perdata Melalui Persidangan Secara Elektronik”, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Volume 9, Nomor 1 (Februari, 2021), hlm. 164-174.

Dhea Mardheana, “Implikasi Yuridis Pemalsuan Tanda Tangan Pada Minuta Akta terhadap Jabatan Notaris (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1234 K/ Pid/2012)”, *Jurnal Lex Renaissance*, Volume 1, Nomor 2, Juli 2016, hlm. 277-292.

Edrick Kangagung, “Akibat Hukum Akta Notaris Yang Dibuat Berdasarkan Surat Atau Dokumen Dari Para Pihak Yang Diketahui Palsu Setelah Akta Dibuat”, *Jurnal Hukum Magnum Opus*, Volume 4 , Nomor 1, Februari 2021, hlm. 59-68.

Evi Purnamawati, Warmiyana Zairi Absi dan Rusniati, “Pemalsuan Identitas Oleh Penjual Kartu (SIM) *Subscriber Identity*”, *Jurnal Solusi*, Volume 20, Nomor 2, Mei 2022, hlm.223-239.

Fahrurrozi dan Samsul Bahri M Gare, “Sistem Pemidanaan Dalam Penyertaan Tindak Pidana Menurut KUHP”, *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 10, Nomor 1, April 2019, hlm. 50-63.

Fina Auliya Rohman Syah, “Pertanggungjawaban Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Yang Dibuatnya Yang Menimbulkan Perkara

- Pidana”, *Jurnal Akta Notaris*, Volume 1, Nomor 2, Desember 2022, hlm. 117-126.
- Ghita Aprillia Tulenan, “Kedudukan Dan Fungsi Akta Di Bawah Tangan Yang Dilegalisasi Notaris”, *Jurnal Lex Administratum*, Volume II, Nomor 2, April- Juni 2014, hlm. 122-130
- I Gusti Bagus Yoga Prawira, “Tanggung Jawab PPAT Terhadap Akta Jual Beli Tanah (*Responsibility Of The Conveyancer Against Selling Land Deed*)”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. IV, Nomor 1, April 2016, hlm. 65-80.
- I.S. Susanto, Kejahatan Korporasi di Indonesia Produk Kebijakan Rezim Orde Baru, *Makalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum*, Fakultas Hukum Undip, Edisi VII/Oktober-Desember, 1999, hlm. 1-36
- Juni Sara, Fuadi, Lidia Fitri, dan Arliansyah, “Pemahaman Masyarakat Terhadap Jual Beli Mukhadharah Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Di Kecamatan Kuta Makmur Kabupaten Aceh Utara)”, *J-EBIS (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam)*, Volume 6, Nomor 1, April 2021, hlm. 89-99.
- Kadek Cahya Susila Wibawa, “Menakar Kewenangan Dan Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Perspektif *Bestuurs Bevoegdheid*”, *Jurnal Crepido*, Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum: Filsafat dan Ilmu Hukum, Volume 01, Nomor 01, Juli 2019, hlm. 40-51.
- Made Erik Krismeina Legawantara, Desak Gde Dwi Arini, Luh Putu Suryani, “Akibat Hukum Perjanjian Jual Beli Hak Atas Tanah”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 1, 2020, hlm. 112-117.
- Michele Angelina Hartono, “Analisis Jual Beli Proforma (Formalitas) Pada Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan PPAT”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 10 No. 12 Tahun 2022, hlm. 2882-2893.
- Nandira Vinzka Cahyagita dan FX. Arsin Lukman, “Keabsahan Jual Beli Hak Atas Tanah Tanpa Persetujuan Salah Satu Pemilik Tanah Berdasarkan Akta Perdamaian”, *Gorontalo Law Review*, Volume 6, Nomor 1 – April 2023, hlm. 174-182.
- Rahmia Rachman, Ahmad Aswar Rowa, dan Hasnawati, “Pertanggungjawaban PPAT Atas Keterangan Palsu Dalam Pembuatan Akta Jual Beli Tanah”, *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 18, Nomor 2, Agustus 2022, hlm. 234-244.
- Shela Oktaharyani Harahap, “Kekuatan Hukum Akta Jual Beli Yang Datanya Merupakan Data Palsu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 226/Pdt.G/2018/Pn.Dpk)”, *Jurnal Hukum Adigama*, Volume 4, Nomor 2, Desember 2021, hlm. 1278-1302.

- Siti Afrah Afifah, Analisis Yuridis Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Hak Atas Tanah (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 250 K/Pdt/2014, Putusan Mahkamah Agung Nomor 1650 K/Pdt/2015, Putusan Mahkamah Agung Nomor 2114 K/Pdt/2016, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 98 K/Pdt/2016), *Syiah Kuala Law Journal*, Vol. 4, No. 2, Tahun 2022, hlm. 123-140.
- Siti Zikrina Farahdiba, Nisrina Nur Sa'idah, Desmi Salsabila & Siti Nur'aini, "Tinjauan Pelanggaran Hak Danpemingkaran Kewajiban Warga Negara Berdasarkan UUD 1945", *Jurnal Kewarganegaraan* Vol. 5 No. 2 Desember 2021, hlm. 837-845.
- Suci Ananda Badu, "Tugas Dan Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dalam Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Di Indonesia", *Jurnal Lex Administratum*, Volume V, Nomor 6, Agustus 2017, hlm. 82-90.
- Tira Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli *Online (Online Shop)* Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Volume 03, Nomor 01, Maret 2017, hlm. 52-62.
- Viona Putri Oktavia, Oci Senjaya, "Analisis Yuridis Dugaan Pemalsuan Akta Jual Beli Oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Berdasarkan UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris", *Jurnal Rectum*, Volume 5, Nomor 1, Januari 2023, hlm. 981-994.
- Vivien Pomantow, "Akibat Hukum Terhadap Akta Otentik Yang Cacat Formil Berdasarkan Pasal 1869 KUHPperdata," *Jurnal Lex Privatum* Vol. VI/No. 7/Sept/2018, hlm. 90-98.
- Yovita Christian Assikin, Lastuti Abubakar, dan Nanda Anisa Lubis, "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Berkaitan Dengan Dibatalkan Akta Jual Beli Ditinjau Dari Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku", *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Volume 3, Nomor 1, Desember 2019, hlm. 80-97.